

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN DIPA GUNA PERCEPATAN PENYERAPAN
ANGGARAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA
SATKER LANTAMAL V**

Samsul Bayan, S.Pd¹, DR. Bambang Irwanto, S.Tr.Han., M.M², Sukarno Effendi, S.M.³

Strategi Operasi Laut, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Jakarta Selatan, Indonesia

Email: ¹faraseniort78@gmail.com, ²bambang_irwanto@seskoal.ac.id, ³sukarno.effendi@gmail.com

ABSTRAK

Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut V yang selanjutnya disebut Lantamal V adalah komando pelaksana dukungan di tingkat Kotama Koarmada II yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima Koarmada II. Bertugas menyelenggarakan dukungan tempur, dukungan logistik, dukungan Pangkalan administrasi maupun dukungan khusus bagi unsur-unsur TNI Angkatan Laut (Kapal, Pesud dan Marinir) dalam melaksanakan operasi dan membina pemberdayaan potensi maritim di wilayah kerjanya menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di laut serta membantu menyelenggarakan dukungan fasilitas pangkalan bagi kesatuan non TNI Angkatan Laut yang melaksanakan operasi sesuai kebutuhan. Lantamal V di dalam melaksanakan tugas pokoknya dihadapkan dengan tuntutan regulasi dan mekanisme di bidang keuangan, penganggaran dan logistik (persediaan dan aset) yang memadai, sehingga diharapkan perlu adanya suatu upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan di bidang keuangan dan anggaran melalui pelaksanaan DIPA di satker Lantamal V dengan melakukan percepatan pengajuan pertanggung jawaban keuangan (PJK) pada awal tahun anggaran, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dalam pengadaan barang/jasa dan peningkatan kesiapan pengelola anggaran dan operator terhadap seringnya perubahan aplikasi keuangan. Berdasarkan dan berpedoman pada landasan pemikiran, mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dengan memanfaatkan peluang yang ada dan meminimalkan kendala yang dihadapi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja satker Lantamal V melalui Optimalisasi Pelaksanaan DIPA guna Percepatan Penyerapan Anggaran dalam rangka Meningkatkan Kinerja Satker Lantamal V.

Kata kunci: Pelaksanaan DIPA, PJK, SDM, Aplikasi Keuangan.

ABSTRACT

Main Naval Base of Indonesian National Navy V here in after referred to Main Naval Base V is support implementation command in Kotama Koarmada II level whose duty is responsible to Koarmada II command tasked with organizing combat, logistic, administration or special support for Navy elements (ship, piss and marines) in implementing operation and building potency empowerment in work territory become national defense force in the sea and also help to perform support facility base for non Indonesian National Navy which implement operation ccordance with need. Main Naval Base V in implementing Its main duty faced with demand regulation and mechanism in a adequate finance, budget and logistic (supply and asset) so that it is hoped the importance of an effort to fulfill the need in finance and budget section through DIPA use implementation in Main Naval Base V work unit by doing finance accountabilty submission acceleration (PJK) at the beginning of budget year, improving human resourcesprofessionalism in procurement of goods and services and increasing the radiness budget manager and operator to frequent application change of finance. Based on and guided by thought foundation, considering the influencing factors by utilizing the available opportunity and minimilizing the encountered obstacles so that it can increase the performance work unit of Main Naval Base V through optimizing the implementation of DIPA use to accelerate the internal budget absorption in frame of improving performance work unit of Main Naval Base V.

Keywords: *Implementation DIPA, finance accountabilty, human resources and finance application.*

1. PENDAHULUAN

Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut V yang selanjutnya disebut Lantamal V adalah komando pelaksana dukungan di tingkat Kotama Koarmada II yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima Koarmada II. Lantamal V bertugas menyelenggarakan dukungan tempur, dukungan logistik, dukungan administrasi maupun dukungan khusus bagi unsur-unsur TNI Angkatan Laut (Kapal, Pesud dan Marinir) dalam melaksanakan operasi dan membina pemberdayaan potensi maritim di wilayah kerjanya menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di laut serta membantu menyelenggarakan dukungan fasilitas pangkalan bagi kesatuan non TNI Angkatan Laut yang melaksanakan operasi sesuai kebutuhan. Dalam melaksanakan tugasnya Lantamal V menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi pendukung satuan operasi yang meliputi:

- 1) Fungsi dukungan fasilitas labuh.
- 2) Fungsi dukungan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.
- 3) Fungsi dukungan fasilitas pembekalan.
- 4) Fungsi dukungan fasilitas perawatan personel.
- 5) Fungsi dukungan fasilitas pembinaan pangkalan.

b. Fungsi Keamanan Laut.

c. Fungsi pemberdayaan Matra Laut.

Lantamal V di dalam melaksanakan tugas pokoknya dihadapkan dengan tuntutan regulasi dan mekanisme di bidang keuangan, penganggaran, logistik (persediaan dan aset) yang memadai. Dalam pelaksanaan dibidang keuangan Satker Lantamal V dilaksanakan sepenuhnya oleh Akun Lantamal V selaku staf Komandan Lantamal V. Kinerja Akun Lantamal V sangat penting guna mendukung tugas Lantamal V. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Pada saat ini laporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Akun Lantamal V melalui Kementerian Keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), sehingga diharapkan perlu adanya suatu upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan di bidang keuangan melalui Optimalisasi Pelaksanaan DIPA guna Percepatan Penyerapan Anggaran dalam rangka Meningkatkan Kinerja Satker Lantamal V.

Penyerapan anggaran yang optimal dan sesuai dengan perencanaan awal akan menyebabkan terciptanya kegiatan perekonomian berjalan sesuai dengan semestinya namun jika terjadi keterlambatan secara ekonomis akan menyebabkan kerugian negara. Permasalahan keterlambatan dan ketidakpastian penyerapan anggaran akan menyebabkan jumlah *idle cash* pada rekening pemerintah yang cukup besar, jika hal ini tidak bisa ditangani maka dalam pengelolaan kas yang

berlebih akan menimbulkan resiko dan bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen kas yang baik. Pelaksanaan anggaran belanja satker Lantamal V hampir dipastikan bahwa setiap tahun anggaran terjadi peningkatan tajam pencairan dana. Trennya adalah tiga bulan terakhir selalu melonjak dengan drastis. Pada semester kedua terutama di tiga bulan terakhir, penyerapan anggaran melonjak dengan drastis, bahkan ada yang berpendapat terkesan agak dipaksakan. Artinya rencana penarikan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang sudah direncanakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan disetujui oleh menteri keuangan tidak dilaksanakan sesuai perencanaan. Pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat tidak sesuai perencanaan mungkin karena proses perencanaan yang kurang realistis ataupun adanya efisiensi dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. Dari fenomena-fenomena tersebut di atas terdapat permasalahan sebagai berikut : Pertanggung Jawaban Keuangan (PJK) lambat diajukan pada awal tahun anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM) kurang profesional dalam pengadaan barang/jasa dan seringnya perubahan aplikasi keuangan. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan dalam meningkatkan kinerja satker Lantamal V. Untuk menunjang keberhasilan tersebut perlu adanya upaya-upaya pemecahan masalah yang berdasarkan dan berpedoman pada landasan pemikiran serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dengan memanfaatkan peluang yang ada dan

meminimalkan kendala yang dihadapi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan Kinerja satker Lantamal V melalui tulisan “Optimalisasi Pelaksanaan DIPA guna Percepatan Penyerapan Anggaran dalam rangka Meningkatkan Kinerja Satker Lantamal V”.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif dan deskriptif analisis dengan pendekatan studi pustaka yang dipadukan dengan pengalaman penulis selama penugasan sebagai Bendahara Pengeluaran Akun Lantamal V. Dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan DIPA guna percepatan penyerapan anggaran dalam rangka meningkatkan kinerja satker Lantamal V.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam teori penyerapan anggaran, pengukuran penyerapan anggaran satuan kerja adalah proporsi/persentase jumlah anggaran yang telah direalisasikan dalam satu tahun anggaran terhadap jumlah pagu anggaran. Penyerapan anggaran merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target rencana yang telah dicapai oleh instansi. Mengukur daya serap membutuhkan lebih dari sekedar membandingkan dana yang tersedia dan pengeluaran yang sebenarnya. Namun hal ini tidak dibarengi dengan pola penyerapan anggaran yang baik yang terjadi pada satker Lantamal V. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertanggung jawaban

keuangan (PJK) lambat diajukan pada awal tahun anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM) kurang profesional dalam pengadaan barang/jasa dan seringnya perubahan aplikasi keuangan guna percepatan penyerapan anggaran.

a. Pertanggung Jawaban Keuangan (PJK) lambat diajukan pada awal tahun anggaran. Dalam teori pengeluaran pemerintah bahwa pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos. Pertama, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa. Kedua, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, dimana gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan. Dan ketiga, pengeluaran pemerintah untuk transfer *payment*, yaitu pemberian atau pembayaran langsung kepada masyarakat, seperti subsidi, bantuan langsung, pembayaran pensiun dan lain-lain. KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA. Berdasarkan uraian di atas maka Pelaksanaan DIPA di Satker Lantamal V merupakan tanggung jawab Komandan Lantamal V selaku KPA kepada PA.

Pada pelaksanaan DIPA di satker Lantamal V diharapkan adanya tertib terhadap proses pelaksanaannya sehingga dapat menjadi tolak ukur terhadap apa yang telah dilaksanakan. Adanya kejelasan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan anggaran antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran (BP), maka harus memperhatikan koordinasi dan

komunikasi yang baik antara bagian dan subbagian satker di satker Lantamal V. Hal ini dapat mempercepat pertanggung jawaban keuangan (PJK) di awal tahun anggaran yang berdampak pada proses pencairan anggaran, sehingga penyerapan anggaran lebih cepat.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) kurang profesional dalam pengadaan barang/jasa. Dalam teori manajemen sumber daya manusia, bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan segala macam sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Permasalahan terkait dengan pengadaan barang/jasa yang dapat menghambat proses percepatan penyerapan anggaran, diantaranya adalah terbatasnya pegawai/pejabat pengadaan di satker Lantamal V yang mempunyai sertifikat. Pemberian sertifikat tersebut sangatlah selektif karena hanya pegawai/pejabat yang benar-benar dipandang mempunyai kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa saja yang akan diberi sertifikat dengan dibuktikan pegawai tersebut lulus dalam ujian pengadaan barang/jasa. Untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mengawaki setiap bagian untuk mendukung kegiatan pengadaan barang dan jasa

guna percepatan penyerapan anggaran dalam rangka meningkatkan kinerja satker Lantamal V perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Kursus pengadaan barang dan jasa. Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pegawai/pejabat di satker Lantamal V yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa yang merupakan syarat mutlak bagi pegawai/pejabat pengadaan maka dapat mengusulkan personel TNI atau PNS untuk kursus pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di Tingkat TNI AL (Mabesal) yang bekerjasama dengan LKPP.

2) Latihan Dinas Dalam (LDD). Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam satker Lantamal V dapat diselenggarakan Latihan Dinas Dalam (LDD) yang di fokuskan untuk proses pengadaan barang dan jasa serta pembayarannya, seperti: LDD pembuatan kontrak dan LDD kelengkapan Pertanggung Jawaban Keuangan (PJK).

c. Seringnya perubahan aplikasi keuangan guna percepatan penyerapan anggaran. Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh, sedangkan dalam teori akuntansi, bahwa akuntansi adalah bentuk pengertian yang digunakan untuk menunjukkan spekulasi, metodologi dan bentuk kerangka kerja serta mempelajari bentuk pelaporan keuangan. Teori akuntansi juga membahas tentang bagaimana

bentuk prinsip pelaporan keuangan tersebut diterapkan dalam industri yang berkaitan dengan akuntansi. Teori ini pada dasarnya digunakan sebagai kajian untuk memahami pelaporan keuangan dan bagaimana perusahaan atau lembaga menyampaikan laporan tersebut menggunakan cara dan strategi yang tepat.

Di tengah kemajuan teknologi yang berkembang pesat, mengharuskan personel dituntut untuk cepat belajar, memahami aplikasi yang sedang dikembangkan. Salah satunya adalah Aplikasi SAKTI. Aplikasi SAKTI digunakan untuk menggantikan Aplikasi *eksisting* yang saat ini digunakan oleh satker yaitu Aplikasi SAS, SILABI, SAIBA, SIMAK BMN dan Persediaan. SAKTI adalah aplikasi yang digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana bagi satker dalam mendukung *implementasi* SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang mengakomodasi perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran menggunakan konsep *single database* yang dilakukan secara sistem elektronik. Perihal penggunaan Aplikasi SAKTI, karena pelaksanaan anggaran memiliki andil dalam penilaian kinerja instansi khususnya dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang terdiri dari 8 (delapan) indikator pada IKPA, terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu menjadi perhatian kedepannya yaitu: kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil

pelaksanaan anggaran, hal ini dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 6:1 Bobot Kinerja untuk masing-masing in

Aspek	No.	Indikator	Bobot
Kualitas Perencanaan	1.	Revisi DIPA	10%

Anggaran	2.	Deviasi Hal. III DIPA	10%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	3.	Penyerapan Anggaran	20%
	4.	Belanja Kontraktual	10%
	5.	Penyelesaian Tagihan	10%
	6.	Pengelolaan UP dan TUP	10%
	7.	Dispensasi SPM	5%
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	8.	Capaian <i>Output</i>	25%
TOTAL			100%

Sumber: Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-5/Pb/2022.

Aplikasi SAKTI digunakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi satuan kerja lainnya dengan Implementasi aplikasi SAKTI berbasis *web* berfokus pada pemanfaatan teknologi dengan tidak mengesampingkan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Pelatihan yang berkelanjutan akan meningkatkan pemahaman pengelola keuangan negara dalam upaya mewujudkan *good governance*. Aplikasi-aplikasi yang diintegrasikan di SAKTI antara lain, aplikasi RKAKL DIPA menjadi modul

anggaran, aplikasi SAS menjadi modul komitmen dan pembayaran, aplikasi SILABI

, aplikasi SIMAK menjadi modul aset tetap, aplikasi persediaan menjadi modul persediaan, dan aplikasi SAIBA menjadi modul piutang dan pelaporan.

4. KESIMPULAN

a) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan DIPA guna percepatan penyerapan anggaran dapat dilaksanakan dengan mempercepat pengajuan Pertanggung Jawaban Keuangan (PJK) pada awal tahun anggaran. Segera menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Kegiatan (Sprinlakgiat), membuat pertanggung jawaban keuangan (PJK) ataupun kontrak dengan pihak ke III/rekanan dan selanjutnya dilakukan verifikasi serta pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN Surabaya.

b) Pelaksanaan DIPA di satker Lantamal V membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dalam pengadaan barang/jasa. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber

Daya Manusia (SDM) pengadaan barang/jasa yaitu dengan mengikuti kursus pengadaan barang/jasa pemerintah yang bekerja sama dengan LKPP, Latihan Dinas Dalam (LDD) pembuatan kontrak dan kelengkapan Pertanggung Jawaban Keuangan (PJK) serta mengajukan permintaan pegawai/pejabat pengadaan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) ke Koarmada II.

c) Peningkatan kesiapan pengelola anggaran dan operator satker Lantamal V terhadap seringnya perubahan aplikasi keuangan dapat dilaksanakan dengan bimbingan teknis (bimtek), koordinasi dengan KPPN dan menyiapkan sarana pendukung berupa jaringan internet yang memadai karena aplikasi keuangan berbasis *web*.

5. REFERENSI

A. Buku dan Barang Cetak.

Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Akara 2007.

Herriyanto, Hendris. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Di Wilayah Jakarta, 2012.

Hery, S.E., M.Si., CRP., RSA., CFRM., Teori Akuntansi: Pendekatan konsep dan Analisis (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), 1.

Kuncoro, D.E. Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerimaan Aplikasi SIPP pada

Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Dinas PU Provinsi Kaltim, 2013, 364-373.

Kuswoyo, Analisis atas Faktor-faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran, 2011.

Mustopadidjaya A.R., Manajemen proses kebijakan publik: formulasi, implementasi dan evaluasi kinerja, LAN, 2003.

Noviwijaya, A dan Ananda Rohman. Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja 2013.

Samuelson dan Nordhaus. Mikro Ekonomi, Edisi XIV Alih Bahasa: Haris Munandar 1997.

Seftianova dan Adam. Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran pada Satker Wilayah KPPN Malang, 2013.

Widhianto, *Good Governance* dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2010.

B. Publikasi Elektronik.

<http://www.anggaran.depkeu.go.id> di akses tanggal 12 Juli 2023.

Kamus besar Bahasa Indonesia (Depdikbud:1995:628) dan [http://repository.uin-suska.ac.id/762/3/10.%20BAB%20II\(1\).pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/762/3/10.%20BAB%20II(1).pdf), diakses 01 Agustus 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Pengesahan DIPA.

Peraturan Menteri Keuangan
RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
270/PMK.05/2014 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
143/Pmk.05/2018 tentang Mekanisme
Pelaksanaan APBN di Lingkungan
Kemhan dan TNI.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
171/Pmk.05/2021 tentang Pelaksanaan
Sistem SAKTI.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Operasional
Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Dirjend Perbendaharaan Nomor Per-
5/Pb/2022 tentang Petunjuk Teknis
Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Belanja Kementerian
Negara/Lembaga.

Keputusan Panglima Koarmada II Nomor 32
Tahun 2022 tentang Organisasi Pangkalan
Utama TNI AL V.